



BUPATI TELUK WONDAMA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN  
PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN TELUK WONDAMA  
DI TINGKAT KAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Teluk Wondama di Tingkat kampung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

- Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bouven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka

Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411);

17. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keuangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2008 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN TELUK WONDAMA DI TINGKAT KAMPUNG TAHUN 2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Gubernur Papua Barat, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Majelis Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat MRPB, adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar orang asli Papua.
9. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021.
10. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang selanjutnya disingkat DTI adalah dana tambahan yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
11. Bantuan program bersama adalah bantuan keuangan antara Kabupaten dan Kampung dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan yang dibiayai Pemerintah Kabupaten.
12. Orang Asli Papua selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua Barat oleh masyarakat adat Papua Barat.
13. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP) adalah dokumen rencana yang membuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran dan Persentase Peruntukan Anggaran;
- c. Penyaluran dan Penatausahaan;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- e. *Monitoring* dan Evaluasi;

- f. Pelabelan Kegiatan;
- g. Tata Cara Pergeseran dan Perubahan Program dan Kegiatan; dan
- h. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 3

Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Teluk Wondama di tingkat Kampung berpedoman pada prinsip dasar pengelolaan keuangan negara sebagai berikut:

- a. Efisiensi, yakni penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran yang optimal/berhasil guna;
- b. Efektif, yakni pencapaian hasil program/kegiatan dengan target yang telah ditetapkan atau hasil yang berdaya guna yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- c. Ekonomis, yakni perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- d. Transparan, perlunya masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana penerimaan khusus;
- e. Akuntabel, yakni kewajiban seseorang atau Perangkat Daerah (PD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dana penerimaan khusus yang dipercayakan kepadanya;
- f. Kepatutan, yakni adanya tindakan atau sikap yang dilakukan dalam hal pengelolaan dana penerimaan khusus yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;
- g. Manfaat, yakni Dana Otonomi Khusus diarahkan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan yang memberikan dampak langsung sebesar-besarnya kepada OAP;
- h. Partisipatif, yakni pelibatan OAP secara langsung dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara; dan
- i. Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Otonomi Khusus, baik yang dikelola kampung dibahas dan disetujui melalui mekanisme Musyawarah Kampung (Muskam) dan Musrembang Otsus.

## BAB III PENGANGGARAN DAN PERSENTASE PERUNTUKAN ANGGARAN

### Pasal 4

Penganggaran Program Kegiatan Otsus Kabupaten Teluk Wondama untuk 75 Kampung wajib berpedoman pada:

7

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- c. Peraturan Kampung tentang Prioritas Penggunaan Otsus di Tingkat Kampung Tahun Anggaran 2024.

#### Pasal 5

- (1) Jumlah Anggaran Dana Otonomi Khusus Tahun 2024 untuk 75 Kampung dialokasikan sebesar Rp.10.092.148.000 (sepuluh milyar sembilan puluh dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- (2) Pembagian Dana Otonomi Khusus Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2024 diperuntukkan untuk Pembiayaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. Bidang Pendidikan dengan Persentase minimal 30% (tiga puluh persen) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan:
    1. Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khusus OAP di tingkat Kampung (Pakaian seragam, alat peraga, peralatan bermain, dan yang berhubungan dengan kegiatan PAUD);
    2. Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Sekolah Dasar OAP di tingkat Kampung (Buku-buku pembelajaran Sekolah Dasar, Honorarium Guru Honor, Honorarium Bimbingan Belajar, dll);
    3. Bantuan Fasilitas Belajar dan Mengajar untuk Anak sekolah PAUD, SD, SMP, SMU, S1 OAP di tingkat Kampung (Pakaian seragam, buku tulis, meja belajar, kursi belajar, papan tulis dll); dan
    4. Bantuan Pendidikan untuk pelajar (SMP-SMU), Mahasiswa OAP di tingkat Kampung.
  - b. Bidang Kesehatan dengan Persentase minimal 20% (dua puluh persen) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan:
    1. Bantuan Makanan Tambahan dan makanan bergizi untuk Anak 0-24 Bulan khusus OAP di tingkat Kampung;
    2. Bantuan Kesehatan untuk Ibu dan Anak OAP di tingkat Kampung;
    3. Bantuan Pelayanan Dasar Kesehatan untuk OAP di tingkat Kampung;
    4. Bantuan Fasilitas Kesehatan untuk OAP di tingkat Kampung; dan
    5. Bantuan Peningkatan Mutu Kesehatan Anak OAP di tingkat Kampung.
  - c. Bidang Ekonomi dengan Persentase minimal 25% (dua puluh lima persen) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan:
    1. Bantuan Modal Usaha untuk OAP di tingkat Kampung;
    2. Bantuan tempat jualan (pondok) untuk OAP di tingkat Kampung;
    3. Bantuan Fasilitas Ekonomi lainnya untuk OAP di tingkat Kampung; dan

4. Bantuan Peningkatan Mutu usaha untuk OAP di tingkat Kampung.
- d. Bidang Kelembagaan Kampung dengan Persentase minimal 10% (sepuluh persen) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan:
  1. Bantuan Operasional Keagamaan di tingkat Kampung sebesar (5%);
  2. Bantuan Operasional Lembaga Adat OAP di tingkat Kampung (5%); dan
  3. Bantuan Operasional Pembangunan 52 Kampung Pemekaran untuk per kampung sebesar Rp.40.000.000,00.
- e. Bidang Administrasi Kependudukan tingkat kampung dengan Persentase minimal 5% (lima persen) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan:
  1. Pendataan dan Pengimputan data SAIK pada Aplikasi di Tingkat Kampung pada Aplikasi SAIK Plus Tahun 2024; dan
  2. Pemutahiran data SAIK di Tingkat Kampung pada Aplikasi SAIK Plus Tahun 2024.

#### BAB IV PENYALURAN DAN PENATAUSAHAAN

##### Pasal 6

- (1) Dana Otonomi Khusus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama ke masing-masing Rekening Kas Kampung.
- (2) Setiap tahapan penyaluran ditetapkan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus dengan persentase tertentu dari jumlah alokasi Dana yang diterima masing-masing kampung dengan syarat:
  - a. Penyaluran Tahap I (50%) dengan persyaratan:
    1. Laporan Pertanggungjawaban Otsus Tahun sebelumnya (Tahap I, II, III) telah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
    2. Laporan SAIKplus telah terimput pada Aplikasi SAIKplus minimal 51% dari jumlah data penduduk kampung.
    3. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB) yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Kampung (Muskam).
    4. Persyaratan Permohonan Pencairan Otsus Tahap I terdiri dari:
      - a) Surat Permohonan Pencairan di tujukan kepada Bupati Teluk Wondama;
      - b) Rencana Penggunaan Dana Tahap I (50%);
      - c) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Dana; dan
      - d) Surat Rekomendasi Distrik yang menyetujui pencairan Dana Otonomi Khusus.

- b. Penyaluran Tahap II (50%) dengan persyaratan:
1. Laporan Pertanggungjawaban Otsus Tahap I (50%) Tahun berjalan yang telah diAudit/diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten selanjutnya disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  2. Laporan SAIKplus telah terimput pada Aplikasi SAIKplus minimal 100% dari jumlah data penduduk kampung yang telah divalidasi/diperiksa oleh Dinas Teknis;
  3. Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RAB) yang telah ditetapkan melalui Musyawarah Kampung (Muskam); dan
  4. Persyaratan Permohonan Pencairan Otsus Tahap II (50%) terdiri dari:
    - a. Surat Permohonan Pencairan di tujukan kepada Bupati Teluk Wondama;
    - b. Rencana Penggunaan Dana Tahap II (50%);
    - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Dana; dan
    - d. Surat Rekomendasi Distrik yang menyetujui pencairan Dana Otonomi Khusus.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Setiap Anggaran Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2024 yang telah direalisasikan atau dicairkan wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan Negara yang disampaikan secara berjenjang, melalui Distrik, Bupati Teluk Wondama (Dinas teknis yang mengelola Otsus di tingkat Kampung).
- (2) Kepala Kampung wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus sesuai tahapan transfer kepada Bupati Teluk Wondama dalam bentuk berkas cetak (*hardcopy*) dan berkas digital (*softcopy*).
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan penyaluran dari Rekening Kas Kampung melalui Rekening Kas Umum Kabupaten.
- (4) Dokumen-dokumen Laporan Penggunaan Anggaran Otonomi Khusus yang wajib di laporkan adalah:
  - a. Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2023;
  - b. Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang tidak terealisasi (Silpa 2023);
  - c. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Cover Laporan Pertanggungjawaban;
2. Lembar Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban oleh Dinas DPMK Teluk Wondama;
3. Lembar serah terima Laporan Kegiatan (LPJ) ke Inspektorat Kabupaten Teluk Wondama;
4. Surat Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ke Bupati Teluk Wondama;
5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermetarai 10.000 yang ditandatangani oleh Kepala Kampung;
6. Fotocopy Slip Penarikan dari Bank Papua yang telah divalidasi;
7. Buku Kas Umum Kegiatan Otsus 2024;
8. Bukti-bukti Belanja (Nota, Kwitansi);
9. Buku Pajak Kegiatan Otsus 2024;
10. Bukti-bukti Setoran Pajak (PPN, ppH);
11. Lampiran Dokumentasi hasil kegiatan (foto transparansi penyaluran, foto hasil kegiatan); dan
12. Lampiran Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan.

#### Pasal 8

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi rekapitulasi alokasi dan realisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus diuraikan berdasarkan, program/kegiatan di tingkat kampung tahun berkenaan (tahun n).
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

*Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Otonomi Khusus bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan perencanaan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan kampung; dan
- b. kesesuaian antara capaian rencana pembangunan kampung dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan di tingkat kampung.

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan program dan kegiatan Dana Otonomi Khusus dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran serta arah penggunaan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Distrik melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kampung yang bersangkutan, dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan;
  - b. Evaluasi dilaksanakan oleh BP4D dan DPMK Kabupaten dalam rangka mengendalikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kampung, dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati serta Gubernur melalui BP4D Provinsi kali dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Laporan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bupati Teluk Wondama paling lama 5 (lima) hari kerja setelah monitoring lapangan dilaksanakan;
  - d. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan penggunaan sumber Dana Otonomi Khusus, Bupati mengatur dan melakukan pengendalian dan evaluasi penggunaan di daerah yang dipimpinnya dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi Dana Otonomi Khusus di tingkat Kabupaten;
  - e. Evaluasi Dana Otonomi Khusus di tingkat kampung sebagaimana dimaksud pada uruf d dikoordinir oleh DPMK Kabupaten Teluk Wondama.
  - f. Evaluasi pencapaian target pengelolaan Dana Otonomi Khusus, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
    1. evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dibiayai dengan Dana Otonomi Khusus yang dikelola Pemerintah Kampung dilaksanakan berdasarkan indikator, sasaran dan target kinerja yang terukur, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana kerja pembangunan kampung (RKPK) dan termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK);
    2. evaluasi pelaksanaan rencana kerja pembangunan kampung (RKPK) yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) sebagaimana dimaksud pada point (1) wajib dilakukan oleh masing-masing pemerintahan kampung dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Teknis;
    3. hasil evaluasi Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaporkan ke Bupati teluk Wondama melalui BP4D Kabupaten Teluk Wondama pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Teluk Wondama; dan
    4. hasil analisis/verifikasi Laporan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Prioritas dan Anggaran Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, dijadikan bahan perumusan rencana penggunaan Dana Otonomi Khusus dalam Musrenbang

Otsus serta dijadikan bahan pertimbangan dalam pengalokasian Dana Otonomi Khusus bagi Pemerintah Kampung untuk periode berikutnya.

#### Pasal 11

Pengawasan penggunaan anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dilakukan oleh:

- a. Kepala Distrik;
- b. Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam);
- c. Dinas Teknis terkait;
- d. Inspektorat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. DPRD Kabupaten melakukan pengawasan sesuai fungsinya; dan masyarakat melalui pengawasan Masyarakat.

### BAB VII PELABELAN KEGIATAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan yang didanai dari Dana Otonomi Khusus wajib diberi label sumber Dananya.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada setiap hasil pelaksanaan kegiatan, serta papan keterangan kegiatan.

### BAB VIII TATA CARA PERGESERAN DAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### Pasal 13

- (1) Pergeseran dan/atau perubahan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perubahan prioritas Nasional;
  - b. Perubahan prioritas Kabupaten; dan
  - c. terjadi keadaan kahar yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan awal dan di luar kemampuan manusia;
- (2) Proses pergeseran dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya keputusan hasil Musyawarah Kampung (Muskam) bersama badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam).
- (3) Proses pergeseran dan/atau perubahan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. usulan pergeseran dan/atau perubahan disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Baperkam; dan
- b. usulan pergeseran dan/atau perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran disampaikan oleh Kepala Kampung dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB) Otsus Kampung Tahun berjalan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK);

## BAB IX SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

### Pasal 14

- (1) SiLPA yang berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, pengelolaannya dipisahkan dengan SiLPA yang berasal dari sumber lain.
- (2) SiLPA sebagaimana disebut pada ayat (1) yang berasal dari pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang belum dibayar dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai/membayar Program dan kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayar dan atau belum dapat dilaksanakan.
- (3) SiLPA sebagaimana disebut pada ayat (1) yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran kegiatan, digunakan untuk mendanai program kegiatan prioritas tahun anggaran berjalan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka setiap program dan kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah Kampung wajib mengacu pada Peraturan Bupati ini.

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI TELUK WONDAMA,



HENDRIK S. MAMBOR

PARAF HIRARKI	
Sekretaris Daerah	1
Asisten Bid. Pemerintahan dan K. Melaksanakan Pkaryat	
Kabag. Hukum	1

Diundangkan di Rasiei  
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,



ASER WAROY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2024 NOMOR 4.

Lampiran I : Peraturan Bupati Teluk Wondama  
 Nomor : 4 Tahun 2024  
 Tanggal : 19 Januari 2024

**ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PER KAMPUNG  
 KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2024**

NO.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	ALOKASI RATA-RATA PER KAMPUNG	ALOKASI KAMPUNG PEMEKARAN	LETAK GEOGRAFIS	ALOKASI JUMLAH KK OAP ≥ 180 KK	PAGU TOTAL ALOKASI OTSUS PER KAMPUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1	WASIOR	RADO	105,000,000	35,000,000			140,000,000
2		DOTIR	105,000,000				105,000,000
3		MANIWAK	105,000,000	70,000,000		75,800,000	250,800,000
4		WASIOR II	105,000,000	35,000,000		103,200,000	243,200,000
5		MAIMARI	105,000,000				105,000,000
6		MORU	105,000,000	35,000,000			140,000,000
7		MANOPI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
8		RAMIKI	105,000,000				105,000,000
9		IRIATI	105,000,000	75,000,000		134,800,000	314,800,000
10	WINDESI	WAMESA TENGAH	105,000,000	35,000,000			140,000,000
11		YOPMEOS	105,000,000	35,000,000			140,000,000
12		SOMBOKORO	105,000,000	35,000,000			140,000,000
13		WINDESI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
14		SANDEY	105,000,000	35,000,000			140,000,000
15		AISANDAMI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
16	TELUK DUAIRI	SOBEY	105,000,000	70,000,000		37,600,000	212,600,000
17		YOPANGGAR	105,000,000	70,000,000			175,000,000
18		SOBEY INDAH	105,000,000	35,000,000			140,000,000
19	WODIBOI	WONDIBOY	105,000,000	35,000,000		39,800,000	179,800,000
20		KABOUW	105,000,000				105,000,000
21		ISSUI	105,000,000				105,000,000
22		KAIBI	105,000,000				105,000,000
23	WAMESA	SABUBAR	105,000,000				105,000,000

4

NO.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	ALOKASI RATA-RATA PER KAMPUNG	ALOKASI KAMPUNG PEMEKARAN	LETAK GEOGRAFIS	ALOKASI JUMLAH KK OAP ≥ 180 KK	PAGU TOTAL ALOKASI OTSUS PER KAMPUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
24	WAMESA	AMBUAR	105,000,000	35,000,000			140,000,000
25		KARUAN	105,000,000	35,000,000			140,000,000
26		YARPATE	105,000,000				105,000,000
27		YOMBOKIRI I	105,000,000	35,000,000			140,000,000
28		ISENEBUAY	105,000,000				105,000,000
29		YOMAKAN	105,000,000	35,000,000			140,000,000
30	RUMBERPON	ISEREN	105,000,000	35,000,000			140,000,000
31		YEMBOKIRI II	105,000,000	35,000,000			140,000,000
32		YARIARI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
33		WETTINDAU	105,000,000	35,000,000			140,000,000
34		WOSIMI	105,000,000				105,000,000
35		SARARTI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
36	NAIKERE	YABORE	105,000,000				105,000,000
37		OYAA	105,000,000		30,948,000		135,948,000
38		INYORA	105,000,000				105,000,000
39		UNDURARA	105,000,000				105,000,000
40		RASIEI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
41		TOREY	105,000,000	35,000,000			140,000,000
42		ISEY	105,000,000	35,000,000			140,000,000
43		URIEMI	105,000,000				105,000,000
44		SASIREI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
45	RASIEI	TANDIA	105,000,000				105,000,000
46		WEBI	105,000,000				105,000,000
47		YOMBA	105,000,000	35,000,000			140,000,000
48		SENDERAWOY	105,000,000	35,000,000			140,000,000
49		AMBUMI	105,000,000				105,000,000
50		NANIMORI	105,000,000				105,000,000
51	KURI WAMESA	DUSNER	105,000,000				105,000,000
52		YERENUSI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
53		SOBIAR/SIMIEI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
54	ROON	MUANDARISI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
55		YENDE	105,000,000	35,000,000			140,000,000

NO.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	ALOKASI RATA-RATA PER KAMPUNG	ALOKASI KAMPUNG PEMEKARAN	LETAK GEOGRAFIS	ALOKASI JUMLAH KK OAP ≥ 180 KK	PAGU TOTAL ALOKASI OTSUS PER KAMPUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
56	ROON	SYABES	105,000,000	35,000,000			140,000,000
57		MENARBU	105,000,000	35,000,000			140,000,000
58		NIAB	105,000,000				105,000,000
59		INDAY	105,000,000				105,000,000
60		SARIAY	105,000,000	40,000,000			145,000,000
61		MENA	105,000,000				105,000,000
62	ROSWAR	WAPRAK	105,000,000	35,000,000			140,000,000
63		YOMBER	105,000,000				105,000,000
64		SEYWAR	105,000,000	35,000,000			140,000,000
65		NORDIWAR	105,000,000				105,000,000
66	NIKIWAR	WERABUR	105,000,000				105,000,000
67		MAMISI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
68	NIKIWAR	WERIANGGI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
69		KUREI	105,000,000				105,000,000
70		TAMOGGE	105,000,000				105,000,000
71		KAPRUS	105,000,000	35,000,000			140,000,000
72	SOUG JAYA	YARMATUM	105,000,000	35,000,000			140,000,000
73		REYOB	105,000,000	35,000,000			140,000,000
74		SIRESI	105,000,000	35,000,000			140,000,000
75		NUSPAIRO	105,000,000	35,000,000			140,000,000
JUMLAH PAGU 2024			7,875,000,000	1,795,000,000	30,948,000	391,200,000	10,092,148,000



47

Lampiran II : Peraturan Bupati Teluk Wondama  
 Nomor : 4 Tahun 2024  
 Tanggal : 19 Januari 2024

ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2024  
 PER KAMPUNG

NO.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	ALOKASI RATA-RATA PER KAMPUNG INDIK	ALOKASI KAMPUNG PERSIAPAN	RINCIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN								TOTAL
					BIDANG PENDIDIKAN (30%)	BIDANG KESEHATAN (30%)	BIDANG EKONOMI (25%)	BIDANG INFRASTRUKTUR (KAMPUNG PEMEKARAN)	BIDANG ADMINISTRASI KAMPUNG (5%)	BIDANG KELEMBAGAAN KAMPUNG (10%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1		RADO	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
2		DOTIR	105,000,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
3		MANIWAK	180,800,000	70,000,000	54,240,000	54,240,000	45,200,000	70,000,000	9,040,000	18,080,000	250,800,000		
4		WASIOR II	208,200,000	35,000,000	62,460,000	62,460,000	52,050,000	35,000,000	10,410,000	20,820,000	243,200,000		
5	WASIOR	MAIMARI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
6		MORU	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
7		MANOPI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
8		RAMIKI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
9		IRIATI	239,800,000	75,000,000	71,940,000	71,940,000	59,950,000	75,000,000	11,990,000	23,980,000	314,800,000		
10		WAMESA TENGAH	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
11		YOPMEOS	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
12		SOMBOKORO	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
13		WINDESI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
14		SANDEY	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
15		AISANDAMI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
16		SOBEY	142,600,000	70,000,000	42,780,000	42,780,000	35,650,000	70,000,000	7,130,000	14,260,000	212,600,000		
17	TELUK DUAIRI	YOPANGGAR	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
18		SOBEY INDAH	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
19		WONDIBOY	144,800,000	35,000,000	43,440,000	43,440,000	36,200,000	35,000,000	7,240,000	14,480,000	179,800,000		
20		KABOUW	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
21	WODIBOI	ISSUJ	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
22		KABI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
23		SABUBAR	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
24	WAMESA	AMBUAR	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
25		KARUAN	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
26		YARPATE	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
27		YOMBEKIRI I	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
28		ISENEBUAY	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
29		YOMAKAN	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
30	RUMBERFON	ISEREN	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
31		YEMBEKIRI II	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
32		YARIARI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
33		WETITINDAU	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
34		WOSIMI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
35		SARATI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
36	NAIKERE	YABORE	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
37		OYAA	135,948,000	40,784,400	40,784,400	40,784,400	33,987,000	6,797,400	13,594,800	27,191,600	163,139,600		
38		INTORA	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
39		UNDURARA	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		

4

NO.	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	RINCIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN										TOTAL
			ALOKASI RATA-RATA PER KAMPUNG INDIK	ALOKASI KAMPUNG PERSIAPAN	BIDANG PENDIDIKAN (30%)	BIDANG KESEHATAN (30%)	BIDANG EKONOMI (25%)	BIDANG INFRASTRUKTUR (KAMPUNG PEMEKARAN)	BIDANG ADMINISTRASI KAMPUNG (5%)	BIDANG KELEMBAGAAN KAMPUNG (10%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
40		RASIEI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
41		TOREY	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
42		ISEY	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
43		UREMI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
44	RASIEI	SASIREI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
45		TANDJA	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
46		WEBI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
47		YOMBA	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
48		SENDERAWOY	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
49		AMBUMI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
50		NANIMORI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
51		DUSNER	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
52	KURI WAMESA	YERENUSI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
53		SOBIAR/SIMIEI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
54		MU/ANDARISI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
55		YENDE	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
56		SYARFS	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
57		MENARBU	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
58	ROON	NIAB	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
59		INDAY	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
60		SARIAY	105,000,000	40,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	40,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
61		MENA	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
62		WAPRAK	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
63	ROSWAR	YOMBER	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
64		SEYWAR	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
65		NORDIWAR	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
66		WERABUR	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
67		MAMISI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
68		WERIANGGI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
69		KUREI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
70		TAMOGI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
71		KAPRUS	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
72		YARMATUM	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
73	SOUJ JAYA	REYOB	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
74		SIRESI	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
75		NUSPAIRO	105,000,000	35,000,000	31,500,000	31,500,000	26,250,000	35,000,000	5,250,000	10,500,000	140,000,000		
JUMLAH PAGU 2024			8,297,148,000	1,795,000,000	2,489,144,400	2,489,144,400	2,074,287,000	1,795,000,000	414,857,400	829,714,800	10,092,148,000		

BUPATIRAIK WONDAMA,



PARAF HIRAKI

Sekretaris Daerah

Catatan Hal. Penastintihan dan

Keaslian Dokumen

Kedang Hilam

47